

**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 (STUDI KASUS
PENGENTASAN ANAK PUTUS SEKOLAH
KECAMATAN GUNUNG KIJANG)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji



Oleh :

MAYA Satriani

NIM : 100565201290

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2016**

ABSTRAK

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh karena itu maka sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pendidikan seperti menyediakan sarana dan prasarana penunjang pendidikan maupun menyiapkan beasiswa bagi anak-anak putus sekolah sehingga hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan bisa terpenuhi secara layak, adil dan merata.

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diketahui tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah agar pembaca dapat memahami tentang faktor-faktor penyebab anak-anak putus sekolah dan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap pengentasan anak-anak putus sekolah. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menerjemahkan dan menguraikan data secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran mengenai situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan dan juga didukung dengan bantuan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan para informan berdasarkan indikator-indikator yang ditentukan dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari 1 Kabid Bansos, Kelembagaan dan Rehsos, 1 Kasubbag Umum Kecamatan Gunung Kijang, dan 2 orang anak putus sekolah dan 2 orang alumni peserta pelatihan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya pemerataan yang didapatkan anak putus sekolah belum sepenuhnya merata. Karena pemerintah dalam memberikan seleksi dalam penerimaan peserta pelatihan secara bertahap dan keterbatasan daya tampung. Tidak secara langsung merata.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan saran untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat khususnya anak putus sekolah pemerintah daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi, dengan instansi pemerintah lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan program pengentasan anak putus sekolah agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci : Anak Putus Sekolah, Pendidikan, Pemberdayaan

ABSTRACT

School dropouts is a situation where children experience neglect and abuse due to the attitude of parents who do not give proper attention to the process of development of the child regardless of the child's right to a decent education. Therefore, it has become an obligation for the government to be able to provide education such as providing education facilities and infrastructure as well as setting up scholarships for children out of school so that their rights to education can be fulfilled properly , fairly and equitably.

By doing this research it is known the purpose of making this thesis is that the reader can understand more about the factors that cause children to drop out and what can be done by the government to alleviation of children dropping out of school . Researchers used qualitative descriptive research type . In the study a descriptive researchers translate and decipher the data qualitatively in order to obtain an overview of the circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews with informants based on the indicators specified in the study this. Informants in this study amounted to 6 people consisting of 1 Head Bansos , Institutional and Social Rehabilitation , Subsection 1 General District of Kecamatan Gunung Kijang , and two children out of school and two alumni trainees.

The results showed that in fact obtained equalization of school dropouts has not completely evenly . Because the government in providing the trainee selection in reception gradual and limited capacity. Not directly evenly .

Based on the results of research by the author suggestions to increase community empowerment , especially of school children must be responsive local government , in coordination with other government institutions in addressing the problems that occur on the implementation of reduction of school dropouts in order to ensure the welfare of society

Keywords: School Dropouts, Education , Empowerment



**PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 (STUDI KASUS
PENEGETASAN ANAK PUTUS SEKOLAH
KECAMATAN GUNUNG KIJANG)**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional) dan tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Bab III Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Hak Warga Negara untuk Memperoleh Pendidikan. Pasal 5 berbunyi *"Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan"*. Dan Pasal 6 berbunyi: *"Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar"*.

Indonesia merupakan negara berkembang, dengan ini pendidikan di Indonesia juga masih kurang. Kenapa dikatakan kurang? Karena masih banyak anak yang tidak melanjutkan sekolah alias putus sekolah. Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan

orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Putus sekolah merupakan masalah pendidikan yang tak pernah berakhir. Masalah ini telah berakar dan sulit dipecahkan penyebabnya, tidak hanya karena kondisi ekonomi yang menjadi masalah klasik tapi juga disebabkan oleh kekacauan dalam keluarga, dan faktor-faktor lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu :

1. Kondisi ekonomi keluarga
2. Pengaruh teman yang sudah tidak sekolah
3. Sering membolos
4. Kurangnya minat untuk meraih pendidikan atau mengenyam pendidikan dari anak didik itu sendiri

Disamping itu ada faktor internal dan faktor eksternal

Faktor internal :

1. Dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor
2. Karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti play stasion sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah.
3. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena *Droup Out*.

Faktor Eksternal:

1. Keadaan status ekonomi keluarga.
2. Kurang Perhatian orang tua
3. Hubungan orang tua kurang harmonis

Selain permasalahan diatas ada faktor penting dalam keluarga yang bisa mengakibatkan anak putus sekolah yaitu :

1. Keadaan ekonomi keluarga.
2. Latar belakang pendidikan ayah dan ibu.
3. Status ayah dalam masyarakat dan dalam pekerjaan.
4. Hubungan sosial psikologis antara orang tua dan antara anak dengan orang tua.
5. Aspirasi orang tua tentang pendidikan anak, serta perhatiannya terhadap kegiatan belajar anak.
6. Besarnya keluarga serta orang-orang yang berperan dalam keluarga.

Meski pemerintah sudah memberikan bantuan biaya pendidikan dasar melalui Biaya Operasional Sekolah, jumlah anak putus sekolah di Indonesia masih sulit ditanggulangi. Di asumsikan anak putus sekolah yang tersebar di seluruh Kabupaten Bintan Kecamatan Gunung Kijang sekitar 550 orang anak putus sekolah di jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Diantaranya anak SD/MI berjumlah 125 orang anak, anak SMP/MTs berjumlah 213 orang anak, SMA/MA berjumlah 140 orang anak dan SMK berjumlah 72 orang anak. Data ini merupakan asumsi temuan-temuan dilapangan oleh Kecamatan Gunung Kijang. Untuk itu, Dinas Sosial harus segera memvalidkan beberapa data anak putus

sekolah dan berupaya membuat program-program yang tepat untuk menyikapi persoalan ini bukan hanya sebatas membuat pendidikan paket A, B dan C. (Sumber: Kantor Camat Gunung Kijang, 2014).

Disini penulis akan memaparkan masalah dominan anak putus sekolah di Kecamatan Gunung Kijang yaitu pada perekonomian. Pendapatan perkapita rata-rata pada penduduk Kecamatan Gunung Kijang pada tahun 2014 sekitar 21,70 juta rupiah. Tahun 2014 merupakan tahap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Bintan. Tetapi disaat bersamaan di tahun 2014 Kabupaten Bintan juga dihadapkan pada tantangan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak serta tarif dasar listrik di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian masyarakat. (Sumber: Kantor Camat Gunung Kijang, 2014)

Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah harus adanya berbagai usaha pencegahannya sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, pemerintah maupun oleh masyarakat. Sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Usaha-usaha untuk mengatasi terjadinya anak putus sekolah di antaranya dapat di tempuh dengan cara:

1. Membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak
2. Memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar
3. Mengadakan pengawasan terhadap anak di rumah serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat si anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah.

4. Tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar.
5. Tidak memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang terlalu banyak.

Selain penyuluhan dan beasiswa, pemerintah juga melakukan pendataan anak putus sekolah untuk dikirim ke Cibinong dan Pekanbaru. Di dua tempat itu, kini ada fasilitas yang menampung anak putus sekolah untuk diberi pembekalan kejuruan. Pemerintah mengirim 75 orang anak putus sekolah. Di sana, mereka sekolah selama 6 bulan di sekolah kejuruan. Dikatakan, sebelumnya sudah ada MoU Pemerintah Kabupaten Bintan dengan dua pemerintahan di daerah itu. Intinya, keduanya siap menerima anak putus sekolah tamatan SD dan SMP. ¹ (Sumber: Dinas Sosial, 2014)

Di Cibinong dan Pekanbaru, anak putus sekolah di bawah 18 tahun akan mendapatkan pelajaran pendidikan otomotif, salon, menjahit, dan pendidikan merangkai komputer.

Biaya sehari-hari selama mengikuti pendidikan gratis akan dibiayai Pemerintah Cibinong dan Pekanbaru. Pemerintah hanya meminta dukungan dari orang tua. Karena anak putus sekolah tidak semua orang tak mampu.

Setelah selesai mengikuti pelatihan selama enam bulan, para peserta mendapatkan sertifikat dan daftar nilai. Di dalam daftar nilai ini peserta

¹ Isi Mou:

1. Dalam rangka kerjasama ini pihak pertama menyediakan sumber daya manusia, sekolah pelatihan/portofolio sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama
2. Pihak kedua menyediakan sarana, jasa dan dana sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama
3. Perjanjian kerjasama ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian dengan didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

mengetahui berapa nilai yang mereka peroleh selama mengikuti pelatihan tersebut.

Penilaian yang di dapatkan oleh para peserta adalah penilaian setelah mereka melakukan semua kegiatan yang diberikan. Mulai dari teori, praktek, sampai dengan praktek kerja lapangan yang dilakukan diluar lembaga. Setelah melakukan PKL biasanya peserta menuliskan laporannya kepada pihak yang bersangkutan yang disebut karya tulis dan setelah itu baru kemudian peserta melakukan ujian atau tes secara tertulis mengenai materi-materi yang bukan merupakan materi jurusan.

Selain dengan Pemerintah Daerah Cibinong dan Pekanbaru, Pemerintah Daerah Bintan juga sudah menandatangani MoU dengan Pmerintah Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pemerintah juga mengirim 93 orang anak untuk mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Provinsi Kepulauan Riau. Diharapkan, setelah mendapat pembekalan, mereka pun bisa mencari pekerjaan dengan skiil yang ada.

Dilihat dari masalah dan pembahasan diatas maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul PERAN DINAS SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 (STUDI KASUS PENGENTASAN ANAK PUTUS SEKOLAHKECAMATAN GUNUNG KIJANG)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut, bagaimana peran Dinas

Sosial dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bintan tahun 2014 (studi kasus pengentasan anak putus sekolah Kecamatan Gunung Kijang)

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan

Dengan dilakukannya penelitian ini maka dapat diketahui tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang pemberian keterampilan bagi anak putus sekolah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b. Kegunaan

- a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya hasanah ilmu pengetahuan bagi peneliti dan kalangan pendidikan lainnya yang membutuhkan kajian permasalahan, khususnya mengenai peran Dinas Sosial terhadap anak putus sekolah.
- b. Penelitian ini dijadikan acuan apakah pemberian keterampilan dapat menjadi alternatif pendidikan bagi anak putus sekolah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

D. Konsep Operasional

Guna mempermudah dalam memahami masalah penelitian ini perlu diberi acuan yang bertujuan untuk menentukan kesatuan arah yang berkaitan dengan konsep yang digunakan, dipandang perlu mengoperasionalkan konsep dasar yang digunakan untuk menghindari terjadinya salah penafsiran.

Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian adalah bagaimana cara dinas sosial menanggulangi anak-anak yang putus sekolah dengan

pengentasan anak putus sekolah agar terwujud individu-individu yang berdaya dan menjadikan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan konsep di atas yang menjadi aspek dasar yang digunakan untuk mengukur permasalahan penelitian ini dapat dijelaskan dengan strategi pemberdayaan sumber daya manusia (Priyono, 1996:73)

1. Pemerataan Kesempatan

Adalah untuk memperoleh persamaan aksesibilitas dan keadilan atau sewajarnya tidak membedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama

2. Pengkoordinasian Kegiatan

Disebut pengkoordinasian karena dalam segala bentuk kegiatan harus dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan hasil yang wajar

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk proses kegiatan pelaksanaan, sehingga tidak ditemui hambatan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.

Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. (Sugiono, 2005)

Maryaeni (2005 : 3) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif sebagai medan penemuan pemahaman merupakan kegiatan yang tersusun atas sejumlah wawasan, disiplin, maupun wawasan filosofis sejalan dengan kompleksitas pokok permasalahan yang digarap. Dari paparan di atas, maka dapat peneliti pahami bahwa penelitian yang mengkaji masalah sosial budaya cenderung menggunakan metode penelitian kualitatif sebab permasalahan sosial adalah permasalahan yang bersifat alamiah sebab data-data kualitatif bersifat deskriptif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Penelitian dilakukan di tempat ini karena menurut penulis tempat ini merupakan tempat yang tingkat pendidikannya perlu diperhatikan pemerintah. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan karena merupakan salah satu wilayah yang pendidikannya perlu di perhatikan sebab dari pendidikan dapat melahirkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan sebaiknya pemerintah juga memilih putra dan putri daerah untuk mengembangkan daerahnya.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data Sumber data yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah :

a. Sumber Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data ini berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap objek (kejadian atau kegiatan).

Menurut Lofland dalam Moleong (2011:157) menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan utama atau melalui rekaman atau foto”.

Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu informasi yang diperlukan.

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan yang digunakan untuk menjelaskan data primer. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek atau permasalahan yang diteliti seperti buku-buku literatur, jurnal, dan arsip-arsip yang ada di perpustakaan-perpustakaan maupun di kearsipan Kecamatan Gunung Kijang.

4. Informan

Dalam penelitian ini nara sumbernya adalah informan. Informan adalah sesuai dengan kata yang digunakan, informan adalah orang yang memiliki informasi tentang subjek yang ingin diketahui oleh peneliti. Secara teknis, informan adalah orang yang dapat memberikan penjelasan yang kaya warna, detail, dan komprehensif menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, misalnya, satu peristiwa terjadi atau justru tidak terjadi. Lebih jauh, ia juga mungkin dapat membuat konseptualisasi atau induksi tentang apa yang selama ini diamatinya.

Informan menempati kedudukan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sesuai dengan namanya, informan adalah sumber informasi bagi peneliti. Tanpa informan, tidak ada informasi, dan tanpa informasi jelas tidak ada studi. Seseorang yang membuat laporan tanpa informan sama saja dengan membuat tulisan fiksi seperti cerpen atau novel, atau, maksimal sekalipun membuat laporan faktual, sebenarnya hanya sedang membuat tentang dirinya sendiri.

Apa yang didefinisikan sebagai informan di atas sebenarnya merujuk kepada apa yang dalam sejumlah literatur disebut sebagai informan kunci. Informan kunci adalah, seakan-akan, orang yang maha tahu, mengetahui segala aspek yang ingin dikaji oleh peneliti.

Namun dalam banyak kasus, peneliti kemungkinan sulit untuk mengidentifikasi kehadiran orang semacam itu, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Karena itu, yang peneliti sering temukan adalah, pada faktanya,

hanya informan parsial. Informan parsial mungkin hanya tahu, misalnya, tentang politik, tetapi kurang tahu tentang ekonomi, bahkan tidak tauh sama sekali tentang agama.

Berdasarkan teori diatas maka informan dalam penelitian ini terdiri dari informan utama atau kunci dan informan triangulan. Dalam hal ini yang menjadi informan utama adalah pihak dari Dinas Sosial Kabid Bansos, Kelembagaan dan Rehsos. Yang menjadi informan triangulan adalah pihak Kecamatan Gunung Kijang, Kasubbag Umum, anak putus sekolah dan anak putus sekolah yang mendapatkan bantuan dari pemerintah yang menjadi alumni program pembekalan pelatihan. Informan tersebut dipilih penulis, karena semua informan tersebut memiliki kriteria yang sama yaitu berdomisili cukup lama atau 5 tahun keatas tinggal di Kecamatan Gunung Kijang, Usia di atas 17 Tahun keatas dan bersedia diwawancarai.

1. Kabid Bansos, Kelembagaan dan Rehsos
2. KaSubbag Umum Dinas Sosial
3. Anak Putus Sekolah
4. Alumni Peserta Pelatihan

5. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

a. Wawancara

Adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dan informan atau subjek penelitian. Menurut kamus besar bahasa Indonesia wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada

seorang informan atau otoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada dilapangan.

Nasution (2003 : 106) menjelaskan bahwa observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada objek penelitian.

c. Studi Dokumen

Pengumpulan data dengan meminta data-data tertulis kepada pihak perusahaan yang menjadi objek penelitian, sebagai bahan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini.

d. Studi Pustaka

Merupakan pengumpulan data dengan melakukan bedah pustaka untuk mengambil data teoritis yang digunakan untuk membangun landasan teori yang kuat mendukung analisis yang dipakai. Teknik ini dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan kuliah dan dokumen yang ada dan relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2008:246), mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh “. Aktivitas dalam analisis data, yaitu :

a. Reduksi Data

Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat membuat kesimpulan akhir.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskriptif dalam bentuk narasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Dari awal pengumpulan data, peneliti harus sudah memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui dengan melakukan pencatatan peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, arahan, sebab akibat, kesimpulan perlu diverifikasi agar penelitian yang dilakukan benar dan bisa dipertahankan.

F. Landasan Teori

Konsep pemberdayaan diartikan sebagai proses melepaskan situasi atau keberadaan ketertekanan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kehilangan atau ketiadaan otoritas, keterpinggiran ketersisihan, kebangkitan dari kekalahan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan/*powerless*. Dengan diberdayakan diharapkan dapat memberikan energi dan kekuatan baru untuk dapat mereposisi status yang lemah menjadi setara dan sejajar dengan status yang diharapkan. Ndraha (2000) menegaskan bahwa tujuan mutlak setiap program pemberdayaan adalah peningkatan *bargaining position* dan *bargaining power* suatu pihak agar mampu berhadapan secara relatif sejajar dengan pihak lain dalam rangka menciptakan rasa keadilan bersama melalui solusi (kesepakatan) yang saling menguntungkan.

Paradigma penyelenggaraan pemerintah telah mengalami pergeseran, dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Dalam rangka mencapai *good governance* maka yang dibutuhkan adalah pemberdayaan aparatur sehingga aparatur memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Pemberdayaan merupakan alat yang penting untuk memperbaiki kinerja pegawai sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut HAW Widjaja, “Pemberdayaan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk

bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.“ (Widjaja, 1995:54).

Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan adalah “ suatu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah” (Prijono dan Pranaka,1996:121).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas, pemberdayaan merupakan usaha untuk memperbaiki kinerja aparatur untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan motivasi aparatur yang diberdayakan dengan ilmu pengetahuan yang semakin hari semakin berkembang agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik lagi.

Aida Vitayala (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang beruansa pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana, serta Pengembangan Tiga yaitu ;

- a. Pendampingan yang dapat menggerakkan partisipasi total masyarakat
- b. Penyuluhan dapat merespon dan memantau ubah-ubahan yang terjadi di masyarakat
- c. Pelayanan yang berfungsi sebagai unsur pengendali ketepatan distribusi aset sumber daya fisik dan non fisik yang diperlukan masyarakat

Sedarmayanti dalam bukunya yang berjudul *Rekturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, dalam konsep pemberdayaan menampakan dua kecenderungan :

1. Pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat, organisasi, atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Proses ini sering disebut sebagai kecenderungan sekunder dari makna pemberdayaan.
(Sedarmayanti, 2000:75)

Berdasarkan penjelasan di atas, pemberdayaan merupakan kecenderungan proses menuju kekuasaan, kekuatan atau kemampuan individu seseorang agar lebih berdaya dalam mendorong dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya karena dengan adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang akan dapat menduduki jabatan yang tertinggi untuk menentukan taraf hidup yang lebih baik dari sebelumnya melalui berbagai proses.

Priyono (1996:73) mengemukakan strategi pemberdayaan sumber daya manusia. Secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemerataan Kesempatan
- b. Pengkoordinasian Kegiatan

c. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Tujuan atau makna pemberdayaan ini meliputi :

1. Menciptakan kemandirian dan kepercayaan diri anggota organisasi, pemerintah, maupun anggota masyarakat. Kepercayaan diri dan kemandirian dalam menghadapi berbagai hambatan atau tantangan hidup dapat melahirkan kekuatan dan ketahanan diri untuk menggantungkan harapan kepada pihak lain.
2. Memiliki kegesitan dan proaktif, pemberdayaan manusia menciptakan kegesitan memiliki daya dorong proaktif mencari kegiatan yang dapat lebih menguntungkan.
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan merupakan sumber keterampilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang hasilnya lebih menguntungkan.
4. Kepatuhan dan kesadaran, kehidupan manusia senantiasa diatur oleh suatu ketentuan hidup yang perlu ditaati dan sekedar untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan, baik dalam melakukan kegiatan maupun dalam pergaulan. Kepatuhan dan kesadaran terhadap norma-norma sebagai fundamental kehidupan bermasyarakat, berorganisasi dan sebagainya menjadi terapi yang sangat tepat serta mosaic dalam upaya meningkatkan pemberdayaan, baik pada diri sendiri maupun orang lain. (Makmur, 2007:120-121)

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta yang dapat mengantarkan bangsa mencapai kemakmuran.

Dari segi etimologis, pendidikan berasal dari bahasa Yunani "*paedagogike*". Ini adalah kata majemuk yang terdiri dari kata "*paid*" yang berarti anak dan kata "*ago*" yang berarti aku membimbing. Jadi *paedagogike* berarti aku membimbing anak. Orang yang pekerjaan membimbing anak dengan maksud membawanya ke tempat belajar, dalam bahasa Yunani disebut "*paedagogos*" (Soedomo, 2008: 17). Jadi pendidikan adalah usaha untuk membimbing anak.

Pendidikan seperti yang diungkapkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

3. Putus Sekolah

Ary H. Gunawan (2010: 71) menyatakan bahwa "putus sekolah merupakan predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya". Hal ini berarti, putus

sekolah ditujukan kepada seseorang yang pernah bersekolah namun berhenti untuk bersekolah.

Hal senada diungkapkan oleh Nazili Shaleh Ahmad (2011: 134) bahwa yang dimaksud dengan putus sekolah yaitu “berhentinya belajar seorang murid baik ditengah-tengah tahun ajaran atau pada akhir tahun ajaran karena berbagai alasan tertentu yang mengharuskan atau memaksanya untuk berhenti sekolah”. Hal ini berarti putus sekolah dimaksudkan untuk semua anak yang tidak menyelesaikan pendidikan mereka.

G. Gambaran Umum dan Gambaran Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gunung Kijang

a. Gambaran Kecamatan Gunung Kijang

Kecamatan Gunung Kijang adalah salah satu dari sepuluh kecamatan yang ada di Kabupaten Bintan. Kecamatan Gunung Kijang pada awalnya hanya berdiri sebagai kecamatan pembantu dari Kecamatan Bintan Timur. Pada tanggal 20 September 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau No. 22 Tahun 2001 secara resmi Kecamatan Gunung Kijang dinaikkan statusnya menjadi kecamatan dengan empat desa dengan batas wilayah yaitu:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Telok Sebong
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Bintan Timur
3. Sebelah Barat : Kecamatan Toapaya
4. Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur dan Laut

Secara geografis Kecamatan Gunung Kijang terletak antara 0°59'18" Lintang Utara – 1°10'20" Lintang Utara dan 104°36'6" Bujur Timur di sebelah

barat dan 104°43'17" di sebelah timur. Daerah Kecamatan Gunung Kijang merupakan daerah iklim tropis dengan suhu maksimal 33,6 °C – 21 °C, curah hujan pertahun 86 hari dan tinggi dari permukaan laut 192 meter.

Luas wilayah Kecamatan Gunung Kijang mencapai 4.803,155 km² dengan luas 376,545 km² daratan (7,84 %) dan 4.426,61 lautan (92,16 %). Luas daratan Kecamatan Gunung Kijang sebagian besar terletak di Pulau Bintan, dan sebagian kecilnya di pulau-pulau.

Selain tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Kijang mempunyai mempunyai Visi dan Misi. Visi dan Misi yang diemban Kecamatan Gunung Kijang adalah sebagai berikut:

a. Visi Kecamatan Gunung Kijang:

Visi merupakan pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, visi Kecamatan Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dijabarkan sebagi berikut “ *Menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berakhlak mulia serta memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat* ”

b. Misi Kecamatan Gunung Kijang

Visi dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yang akan menjadi tanggung jawab Kecamatan Gunung Kijang kabupaten Bintan. Dengan

pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintah. Oleh karena itu misi Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya hidup sehat.
2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia yang ada secara maksimal dalam mengelola Sumber Daya Alam di Kecamatan Gunung Kijang.
3. Mewujudkan generasi muda yang berakhlak mulia dengan memanfaatkan segala potensi tempat pendidikan dan keagamaan.
4. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
5. Melaksanakan koordinasi yang maksimal dengan dinas / instansi terkait sebagai upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur, ekonomi kerakyatan, pendidikan, sosial budaya, agama, keamanan dan ketertiban.

b. Gambaran Anak Putus Sekolah di Kecamatan Gunung Kijang

Pengertian putus sekolah adalah seorang yang telah masuk dalam sebuah lembaga pendidikan baik itu tingkat SD, SMP ataupun SMA untuk belajar dan menerima pelajaran atau tidak sampai tamat atau lulus kemudian mereka berhenti atau keluar dari sekolah.

Sedangkan menurut penulis anak putus sekolah adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan,

dengan kata lain meninggalkan sekolah sebelum menyelesaikan keseluruhan masa belajar yang telah ditetapkan.

Pemerintah melakukan pendataan anak putus sekolah untuk dikirim ke Cibinong dan Pekanbaru. Di dua tempat ini, kini ada fasilitas yang menampung anak putus sekolah untuk diberikan pembekalan kejuruan.

H. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi atau belum layak. Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan pendidikan. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktifitas rendah dan sumber daya manusia yang lemah.

Menurut Sumartiningsih (2004:24) Pemberdayaan masyarakat iartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan sendiri. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan lembaga masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya sendiri berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maka disebutkan salah satu tujuan dari otonomi daerah adalah

memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah.

Untuk mengetahui dan melihat bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menangani kasus pengentasan anak putus sekolah khususnya Dinas Sosial dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pemerataan Kesempatan

Maksudnya disini adalah menjelaskan bagaimana cara Pemerintah dalam memberikan kesempatan untuk anak putus sekolah memperoleh pendidikan yang bersifat pelatihan dan sosialisasi. Dinas Sosial bekerja sama dengan dinas dan kecamatan terkait untuk hal ini. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Sosial itu sebenarnya dilakukan dengan penjangkauan. Penjangkauan itu artinya merekrut calon peserta pelatihan. Hal itu dilakukan dengan cara menyebarkan surat kepada instansi terkait dan karang taruna dan sebagainya. Penjangkauan itu upaya mencari calon klien untuk dididik. Karena Kecamatan Gunung Kijang lumayan luas jadi tidak dipanggil semua. Dinas sosial melalui surat pemberitahuan bahwa sudah saatnya penerimaan. Itu juga salah satu cara untuk menjangkau. Bisa juga melalui anak dari mulut ke mulut. Jadi kalau sosialisasi khusus manggil masyarakat tidak ada.

Pemerataan kesempatan dalam arti pemerataan pendidikan untuk memperoleh pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama di negara-negara sedang berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam

pembangunan bangsa, seiring juga dengan berkembangnya demokratisasi pendidikan dengan semboyan education for all.

Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu equality dan equity. Equality atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan equity bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antarkelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Dalam program pemerintah terhadap anak putus sekolah pemerintah Indonesia secara formal telah mengupayakan pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, dilanjutkan dengan wajib belajar pendidikan sembilan tahun mulai tahun 1994. Upaya-upaya ini nampaknya lebih mengacu pada perluasan kesempatan untuk memperoleh pendidikan.

Di samping itu, pada tahapan selanjutnya pemberian program beasiswa menjadi upaya yang cukup mendapat perhatian dengan mendorong keterlibatan masyarakat melalui Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Program beasiswa ini semakin intensif ketika terjadi krisis ekonomi, dan saat ini diganti program BOS untuk pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga pemeliharaan siswa agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di sekolah.

Memberikan kesempatan untuk anak putus sekolah dalam mengikuti sosialisasi dan pelatihan merupakan kewajiban. Karena dari diadakannya sosialisasi dan pelatihan menambah pengetahuan bagi anak putus sekolah. Disini dijelaskan juga pelatihan apa saja yang diberikan oleh Dinas Sosial.

Sedarmayanti (2004:117-118) menyatakan bahwa:

Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu:

1. Kecenderungan primer yaitu proses yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna untuk mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder yang menekankan pada proses memberikan atau menstimulasi, mendorong dan memotivasi agar individu-individu tersebut mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”.

Berdasarkan kepada pernyataan tersebut, dapat dijelaskan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan menggali potensi-potensi yang ada atau dimiliki oleh masyarakat dan ditujukan untuk tujuan pembangunan, lalu ditumbuhkembangkan peran serta masyarakat untuk ikut terlibat baik itu melalui pemberian motivasi atau dorongan yang diberikan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri bagi mereka langkah yang akan ditempuh dalam peningkatan hidupnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan oleh informan Ibu Dra. Sya'diah selaku Kepala Bidang Bantuan Sosial, Kelembagaan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial bahwa Dinas Sosial memberikan beasiswa dan juga pelatihan pembekalan kejuruan agar nanti bila dilepas anak-anak tersebut sudah mendapatkan pembekalan dan mampu mencari kerja sesuai dengan skill yang mereka miliki. Biasanya Dinas sosial melakukan sosialisasi berupa pemberian motivasi tentang pentingnya pendidikan sekaligus memantau dan mendata anak putus sekolah.

Tujuan dari pelatihan adalah proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis dan konseptual yang akan dijalankan oleh anak putus sekolah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa depan agar apa yang menjadi target bisa tercapai dan hal itu mampu menghasilkan apa yang menjadi tujuan.

Keterampilan teknis yang diberikan untuk anak putus sekolah adalah sosialisasi dan pelatihan. Untuk sosialisasi anak putus sekolah dan orang tua serta masyarakat yang ada di Kecamatan Gunung Kijang diikutsertakan. Sosialisasi diberikan dalam bentuk pendampingan dalam memberikan keterampilan. Sedangkan pelatihan yang pemberian fasilitas berupa pelatihan pembekalan kejuruan sesuai dengan apa yang menjadi minat anak-anak bersangkutan. Disini anak putus sekolah diberikan penjelasan tentang apa saja yang anak-anak tersebut butuhkan sesuai dengan minatnya dan merekapun disekolahkan.

Hal ini untuk meningkatkan kesadaran bagi anak putus sekolah dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan untuk saat ini dan masa depan dengan

memberi bekal pengetahuan dan keterampilan untuk anak putus sekolah agar dapat diterapkan untuk menunjang perekonomian mereka. Inilah salah satu peran pemerintah dalam memberdayakan anak putus sekolah.

Konseptual yang dilakukan pemerintah adalah sistem penilaian. Peran dari dinas sosial adalah menilai kelayakan untuk kriteria penerima bantuan berupa pelatihan dan mengikuti sekolah kejuruan untuk anak putus sekolah di Kecamatan Gunung Kijang.

Setelah melakukan penerimaan peserta, Dinas sosial melakukan seleksi dan wawancara pribadi kepada calon peserta. Seleksi sangat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan calon peserta dari mana calon peserta berasal dan lain-lain.

Seleksi administrasi merupakan seleksi dari kelengkapan surat-surat. Ysang terdiri dari:

1. Fotokopi KTP
2. Pas foto 4x6 2 lembar dan 2x3 2 lembar
3. Surat bebas narkoba (surat keterangan dokter/puskesmas)
4. Surat pengantar dari Rt/Rw, Lurah setempat (surat keterangan tidak mampu dan tidak terlibat kriminal)
5. Surat rujukan dari institusi pelayanan kesejahteraan sosial
6. Ijazah terakhir.

Setelah diseleksi surat-surat tersebut, kemudian dilakukan wawancara secara pribadi kepada calon peserta. Wawancara itu biasanya seputar tujuan

masuk dan wawancara tentang kehidupan calon peserta seperti pernah sekolah sampai tingkat apa dan sudah pernah bekerja atau belum.

Dari total 550 orang anak putus sekolah hanya 75 yang pemerintah kirim ke Cibinong dan Pekanbaru serta 93 orang anak untuk mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Provinsi Kepulauan Riau hal ini di sebabkan karena keterbatasan daya tampung, selain itu seleksi juga dilakukan secara bertahap. Tidak semua anak yang mengikuti seleksi diterima. Hal ini disebabkan tidak lengkapnya seleksi pada administrasi dan tidak hadirnya peserta pada tes seleksi fisik.

Pelatihan yang diberikan pemerintah tidak hanya pelatihan keterampilan tetapi juga diberikan bimbingan sosial dan bimbingan mental kepada peserta pelatihan. Pelatihan dilakukan selama enam bulan. Adapun macam-macam pelatihan keterampilan yang diberikan tersebut adalah :

1. Otomotif
2. Salon
3. Menjahit
4. Merangkai komputer

Dalam pelatihan setiap jurusan tidak merata jumlah pesertanya. Setiap peserta juga memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Ada yang hanya lulusan SD, SMP dan SMA. Dari latar belakang pendidikan yang berbeda inilah dapat mempengaruhi pelatihan, maksudnya peserta yang satu dengan yang lain akan berbeda dalam menangkap materi yang diberikan. Hal ini harus diperhatikan

benar oleh para instruktur pelatihan, karena jika tidak mengerti apa yang disampaikan akan membuat pelatihan itu gagal.

Jurusan otomotif menjadi jurusan favorit dan banyak dipilih oleh calon peserta. Berbeda dengan jurusan lain yang tidak stabil kadang banyak kadang sedikit.

Pelatihan yang dilakukan Dinas Sosial selama enam bulan seharusnya bisa menghasilkan lulusan yang benar-benar siap menghadapi pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya. Karena di dalam lembaga-lembaga pelatihan swasta atau kursus, biasanya hanya diberikan waktu singkat yaitu sekitar satu sampai tiga bulan setiap angkatannya. Jadi, dengan kata lain waktu yang diberikan Dinas Sosial lebih panjang dari lembaga pelatihan swasta atau kursus singkat yang marak akhir-akhir ini. Dari waktu enam bulan tersebut, waktu yang efektif untuk mendapatkan teori dan praktek adalah sekitar empat bulan. Hal ini dikarenakan peserta melakukan program PKL selama satu bulan dibulan terakhir dari pelatihan tersebut.

Untuk lamanya waktu pelatihan dijelaskan bahwa lama tidaknya waktu pelatihan didasarkan pada pertama, jumlah banyaknya suatu kemampuan yang hendak dipelajari karena semakin banyak pengetahuan yang di pelajari semakin lama pula pelatihan tersebut. Untuk di tempat pelatihan materi yang diberikan sudah cukup lengkap. Namun, karena waktu yang diberikan banyak terpotong dengan kegiatan lain maka seakan kurang cukup untuk mendapatkan materi tersebut secara menyeluruh.

Kedua, kemampuan belajar peserta artinya setiap peserta pasti memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Namun di tempat pelatihan semua peserta disamaratakan kemampuannya, sehingga peserta yang memiliki tingkat pendidikan rendah seakan sulit mengikuti materi yang diberikan.

Ketiga, media pengajaran menjadi alat bantu artinya sarana prasarana penunjang pelatihan. Untuk yang ketiga, di tempat pelatihan sudah lumayan mencukupi.

Tahap terakhir setelah keluar dari pelatihan adalah tahap terminasi. Terminasi merupakan kegiatan pengakhiran yang dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap kemajuan penanganan masalah. Terminasi perlu diikuti dengan bimbingan lanjut untuk memantau perkembangan penerimaan layanan setelah kembali ke keluarga dan masyarakat.

Para peserta juga mendapat program Praktek Belajar Kerja atau yang dikenal dengan Praktek Kerja Lapangan di luar Pelatihan selama satu bulan di setiap bulan terakhir menjelang dari Pelatihan tersebut berakhir. Dan untuk mencari tempat PKL tersebut, setiap peserta dibebaskan untuk mencarinya dengan sebelumnya *survey* ke lembaga tersebut dan kemudian datang kembali dengan membawa surat dari Pelatihan untuk lembaga tersebut. Untuk mencari tempat PKL para peserta diberikan waktu selama dua minggu. Tetapi jika menjelang PKL ada peserta yang belum mendapatkan tempat PKL dan berdasarkan pemantauan bahwa peserta tersebut benar-benar mencari tempat PKL, tidak main-main, maka

instruktur pelatihan yang akan memberikan alamat tempat PKL untuk peserta Pelatihan tersebut.

Dari tanggapan diatas dapat dikatakan pemerintah cukup serius dalam memberdayakan anak putus sekolah untuk memotivasi mereka dengan sosialisasi dan memberikan pelatihan-pelatihan di Kecamatan Gunung Kijang. Tetapi, yang menjadi hambatan disini belum terciptanya pemerataan kesempatan untuk anak putus sekolah dikarenakan fasilitas dari pemerintah yang diberikan secara bertahap.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian diatas adalah bahwa anak putus sekolah berhak mendapatkan fasilitas dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak untuk memperbaiki taraf hidup mereka. Agar mereka memperoleh pekerjaan sesuai dengan skil dan kemampuan mereka. Untuk saat ini pemerintah memberikan bantuan berupa pembekalan pelatihan kejuruan, ke depannya pemerintah memberikan bantuan serupa. Mungkin akan lebih banyak anak lagi yang akan mendapatkan pemerataan kesempatan.

2. Pengkoordinasian Kegiatan

Disebut pengkoordinasian kegiatan karena pihak dalam memberdayakan anak putus sekolah melalui Dinas Sosial. Prijono dan Pranaka menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu strategi untuk memperbaiki sumber daya manusia dengan pemberian tanggung jawab dan kewenangan terhadap mereka yang nantinya diharapkan dapat memungkinkan mereka mencapai kinerja yang lebih tinggi di era yang selalu berubah.

Manfaat koordinasi sangat menentukan terselenggaranya pelatihan yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Tetapi apabila koordinasi tidak dilaksanakan melalui pembagian kerja, akan menimbulkan organisasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kesatuan arah. Jadi koordinasi sangat penting dalam mengarahkan para bawahan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas adalah pentingnya koordinasi antara pihak Dinas Sosial dengan pihak Kecamatan Gunung Kijang dalam memberdayakan anak putus sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Kijang. Karena koordinasi yang tepat akan sangat menentukan terselenggaranya pelatihan yang telah diprogramkan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Setiap bantuan yang akan diberikan akan melalui proses penilaian kelayakan terlebih dahulu.

Pemerintah mengirim 75 orang anak putus sekolah untuk mendapatkan pembekalan kejuruan di Cibinong dan Pekanbaru serta 93 orang anak untuk mengikuti pelatihan kerja di BLK. Sistem penilaian berperan penting dalam proses penerimaan bantuan ini. Karena disini berlaku sistem penilaian kelayakan penerima bantuan dalam menerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah secara bertahap. Semua anak putus sekolah mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi dan minat masing-masing.

Apabila koordinasi tidak dilaksanakan secara terkoordinir maka akan menimbulkan hasil yang berbeda dari yang diharapkan. Agar semua tercapai sesuai rencana awal, disini peran pembagian tugas sangat diperlukan. Salah satunya

dengan cara pembagian tugas antar pihak Dinas Sosial dengan pihak Kecamatan Gunung Kijang dalam mengelola anak putus sekolah di wilayah Kecamatan Gunung Kijang.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana untuk mempermudah anak putus sekolah dalam meningkatkan kualitas anak putus sekolah. Aida Vitayala (2000) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah perwujudan *capacity building* masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan Sumber Daya Manusia melalui pengembangan kelembagaan pembangunan mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pedesaan seiring dengan pembangunan sistem sosial ekonomi rakyat, prasarana dan sarana.

Para anak putus sekolah perlu disadarkan pada pentingnya pendidikan dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, sehingga mereka mengerti bahwa pendidikan adalah salah satu faktor yang perlu dipikirkan secara terencana. Sedangkan pemerintah dapat mengambil peran sebagai Pembina dan mediator bagi bertemunya suplai dan permintaan.

Penyediaan sarana dan prasarana sangat penting untuk menunjang kemudahan anak putus sekolah dalam mendapatkan pendidikan yang layak yang ada di Kecamatan Gunung Kijang.

I. Penutup

a. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat dirumuskan berdasarkan paparan hasil analisa penelitian sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya:

1. Pemerataan Kesempatan

Pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, meliputi persamaan aksesibilitas dan keadilan atau kewajaran tidak membedakan dalam mendapatkan kesempatan yang sama. Pada kenyataannya pemerataan yang didapatkan anak putus sekolah belum sepenuhnya merata. Karena pemerintah dalam memberikan seleksi dalam penerimaan peserta pelatihan secara bertahap dan keterbatasan daya tampung. Tidak secara langsung merata.

2. Pengkoordinasian Kegiatan

Maksudnya pengkoordinasian kegiatan karena dalam segala bentuk kegiatan dilakukan kerjasama sehingga hubungan kerja yang dicapai bisa maksimal dan mendapatkan. Hasil yang wajar. Koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dalam bentuk bantuan atau apa saja harus melalui pihak Kecamatan Gunung Kijang yang kemudian baru diberikan untuk anak putus sekolah.

3. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pemberdayaan dilakukan dengan sarana dan prasarana untuk proses kegiatan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak ditemui hambatan. Dinas Sosial memberikan bantuan dan kemudahan untuk

anak putus sekolah untuk meraih pendidikan yang layak di Kecamatan Gunung Kijang. Sarana yang diberikan pemerintah berupa tempat dimana anak-anak dapat melanjutkan pendidikan mereka meskipun bukan pendidikan formal. Sedangkan prasarananya adalah biaya sehari-hari selama berada ditempat pelatihan biaya sehari-hari ditanggung pemerintah.

b. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan diatas adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih merata dalam memberikan sosialisasi. Pengkoordinasian tidak hanya dilakukan dengan pihak Kecamatan saja tetapi juga harus langsung melalui anak-anak yang bersangkutan.
2. Kualitas sarana dan prasarana sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar lebih banyak anak lagi yang dapat ditampung untuk mengikuti pembekalan pelatihan.
3. Tim pelaksana kegiatan mulai dari pemerintah tingkat bawah sampai tingkat atas sebaiknya dapat menjalankan tugasnya masing-masing sesuai dengan pedoman pelaksana kegiatan dengan rasa tanggung jawab dan jujur.
4. Pemerintah daerah harus cepat tanggap, berkoordinasi, dengan instansi pemerintah lainnya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi mengenai pelaksanaan program pengentasan anak putus sekolah agar bisa menjamin kesejahteraan masyarakat.